BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Daerah Aliran Sungai (DAS) merupakan area daratan yang secara topografis dibatasi oleh punggung gunung, dan berfungsi sebagai penampung air hujan, kemudian air tersebut disalurkan ke laut melalui sungai utama (Sudaryono, 2023). Berdasarkan definisi tersebut, DAS dapat diartikan sebagai daerah tangkapan air (*catchment area*) yang terdiri dari berbagai unsur, seperti; *abiotic* (tanah, air, udara), *biotic* (vegetasi, flora dan fauna), dan aktivitas-aktivitas manusia yang saling berkaitan satu sama lain. Upaya yang dilakukan untuk mengatur hubungan timbal balik antara sumber daya alam dan aktivitas-aktivitas manusia disebut pengelolaan DAS. Pengelolaan ini bertujuan untuk menjaga kelestarian dan keseimbangan ekosistem, sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam bagi manusia secara berkelanjutan (Raharja, 2008).

Sungai Citarum merupakan salah satu sungai utama dan terbesar di Jawa Barat yang membentang sepanjang 297 km dengan luas 11.323 km2 atau sekitar 32% dari luas wilayah Jawa Barat. Hulu sungai Citarum berada di Situ Cisanti, kaki Gunung Wayang, Kabupaten Bandung dan bermuara di hilir Pantai Utara Pulau Jawa, Muara Gambong, Kabupaten Bekasi. Sungai ini juga dilintasi oleh tiga waduk diantaranya yaitu Waduk Saguling, Waduk Cirata, dan Waduk Jatiluhur. DAS Citarum memiliki luas sekitar 682.227 km2 yang melewati 13 kabupaten/kota (Jaenudin Nurdiana, 2021). Sebagaimana ditampilkan peta DAS Citarum pada gambar berikut:

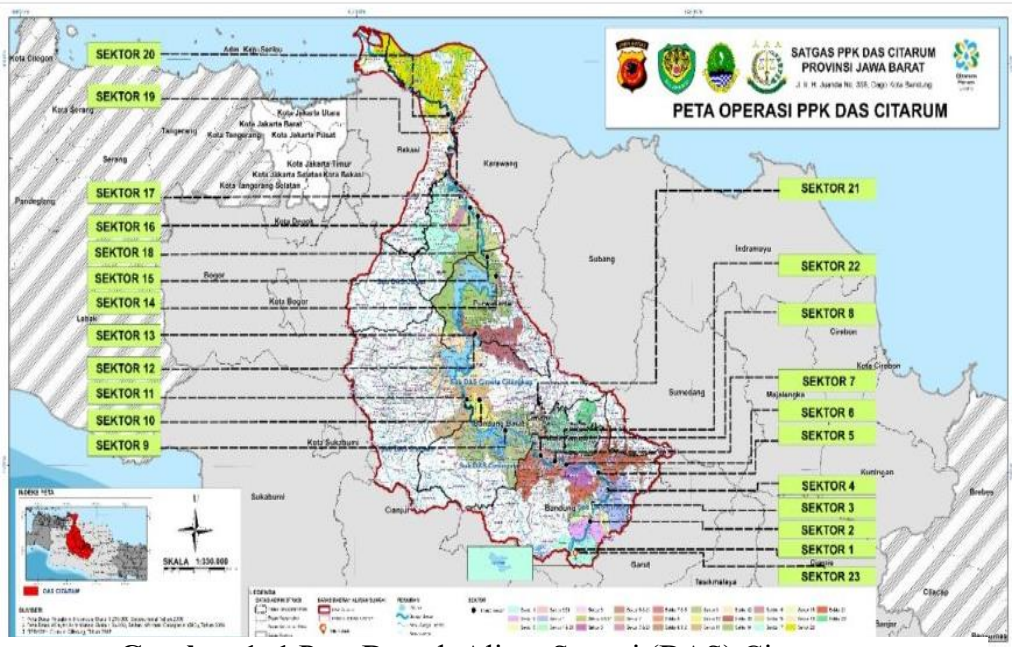

Gambar 1. 1 Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum
Sumber: Dokumen Rencana Aksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DAS Citarum 2019-2025

Berdasarkan dokumen Dewan Sumber Daya Air Nasional, sungai Citarum memiliki manfaat yang sangat luas khususnya bagi kehidupan masyarakat di sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS). Selain sebagai sumber air baku untuk kebutuhan air minum, sumber air irigasi untuk pertanian, juga berfungsi sebagai sumber pembangkit listrik bagi Pulau Jawa-Bali dengan kapasitas sebesar 2.585 Megawatt (Rojak et al., 2021). Lebih jauh lagi, sungai Citarum berkontribusi sebesar 20% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia karena mampu mendukung beberapa sektor seperti pertanian, perikanan, pariwisata, dan industri (Faagna et al., 2024).

Akan tetapi, seiring dengan meningkatnya pertumbuhan populasi penduduk, meningkatnya kebutuhan akan air bersih, serta pesatnya aktivitas pada berbagai sektor kehidupan, dapat berdampak langsung pada penurunan tingkat kuantitas dan kualitas air sungai Citarum secara terus menerus. Salah satu faktor utama penurunan kualitas air tersebut adalah meningkatnya pencemaran air akibat sampah. Air yang sudah terkontaminasi oleh zat-zat berbahaya yang terkandung di dalam sampah dapat menjadi sumber bakteri

untuk berkembang biak. Dan apabila air terkonsumsi, maka akan menimbulkan risiko penyakit seperti diare, kolera, dan infeksi kulit bagi masyarakat sekitar DAS (Laili & Sofyan, 2017).

Berdasarkan hasil penelitian Puslitbang Sumber Daya Air dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat, menyatakan bahwa tingginya pencemaran air akibat sampah menyebabkan kualitas air sungai Citarum belum memenuhi baku mutu yang telah ditetapkan. Bahkan, sungai Citarum pernah dinobatkan sebagai sungai dengan tingkat pencemaran tertinggi dan terburuk di dunia menurut *Green Cross Swizerland* dan *Blacksmith Institute* sebuah lembaga internasional yang *concern* dalam mengatasi masalah lingkungan akibat pencemaran, ditulis dalam suatu dokumen yang berjudul "*The World's Worst 2013: The Top Ten Toxic Threats*" (Belinawati et al., 2018).

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk memulihkan kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum melalui program-program yang pernah digulirkan seperti; program Citarum Bergetar (Bersih, Geulis, dan Lestari) pada tahun 2001, program Investasi Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu Citarum (ICWRMIP) pada tahun 2008, dan program Citarum Bestari (Bersih Sehat Indah, dan Lestari) pada tahun 2013. Namun demikian, hasil dari program-program ini belum memberikan dampak signifikan terhadap pemulihan kualitas air dan kerusakan lingkungan di DAS Citarum (Andri Yayan & Maulana Yaya, 2021).

Sebagai respons atas pencemaran DAS Citarum yang tak kunjung reda, Presiden ke-7 RI Bapak Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum. Kemudian merancang program Citarum Harum dan dimandatkan kepada Gubernur Jawa Barat sebagai Komandan Satgas, dengan menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 28 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Pengendalian Pencemaran

dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum 2019-2025. Salah satu fokus utama program ini adalah upaya pengelolaan sampah di lokasi-lokasi prioritas yang memiliki tingkat pencemaran tinggi akibat sampah, guna meningkatkan kualitas dan baku mutu air secara menyeluruh.

Tingginya tingkat pencemaran air akibat sampah di DAS Citarum, dapat ditinjau dari kadar BOD (*Biochemical Oxygen Demand*) yang ada pada sungai. BOD ialah ukuran jumlah oksigen yang diperlukan oleh mikroorganisme untuk menguraikan sampah organik di dalam air. Sungai yang memiliki kadar BOD tinggi, menunjukkan terjadinya suatu pencemaran dan kerusakan yang dapat berdampak buruk terhadap kualitas air sungai. Hasil pengukuran kadar BOD di beberapa titik wilayah Kabupaten Bandung, menunjukkan bahwa hampir seluruh sampel lokasi memiliki kadar BOD jauh di atas ambang batas yang diperbolehkan, yaitu maksimal 3 mg/l, sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 1. 1
Kandungan BOD Pada Lokasi Titik Sampel di Kabupaten Bandung (mg/1)

Lok	Wilayah	Tahun						Rata-Rata
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
C1	Kertasari	3.20	2.66	14.18	2.05	1.80	2.61	4.42
C2	Ibun	5.98	5.40	25.12	4.03	4.48	7.39	8.76
C3	Majalaya	20.51	23.89	37.85	17.35	18.91	20.88	23.23
C4	Bojongsoang	26.86	26.11	61.15	30.17	50.38	33.50	38.03
C5	Baleendah	35.27	39.47	25.90	41.73	90.03	55.84	48.04
C6	Dayeuhkolot	38.66	37.57	54.52	33.57	56.68	31.73	42.12
C7	Ciparay	9.11	7.87	24.32	10.38	10.83	8.10	11.77

Sumber: Buku Kajian Daya Tampung dan Alokasi Beban Pencemaran Sungai Citarum

Berdasarkan tabel tersebut, terindikasi bahwa titik lokasi sampel C5 yaitu wilayah Baleendah memiliki tingkat kadar BOD tertinggi yakni mencapai rata-rata 48.04 mg/l dan termasuk pada kategori zona tercemar berat (Engkus et al., 2020). Tingginya kadar BOD utamanya disebabkan oleh banyaknya bahan organik yang terurai dalam air, seperti limbah domestik, limbah industri,

sisa-sisa makanan, kotoran manusia, dan bahan-bahan organik lainnya. Keterkaitan antara kandungan BOD dan sampah organik, terletak pada kebutuhan bahan organik akan oksigen agar dapat terurai. Semakin banyaknya sampah organik di sungai, maka semakin besar pula kebutuhan oksigen BOD yang dibutuhkan, dan menjadi tanda bahwa sungai Citarum di wilayah Baleendah semakin tercemar.

Baleendah termasuk ke dalam wilayah kerja Sektor 6 Satgas Citarum Harum dengan luas sekitar 1.253 km^2. Berdasarkan dokumen Rencana Aksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum, menetapkan wilayah Baleendah sebagai salah satu lokasi prioritas pengelolaan sampah. Hal ini disebabkan karena wilayah ini berada di Hulu sungai Citarum, sehingga memiliki tingkat volume sampah yang lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah Tengah dan Hilir sungai. Selain itu, berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung, tingginya volume timbulan sampah juga disebabkan karena Kecamatan Baleendah merupakan wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak di Kabupaten Bandung yakni sekitar 7,34% penduduk.

Secara lebih spesifik, berdasarkan data timbulan sampah yang diperoleh dari Dokumen Laporan Kegiatan Tahunan Sektor 6 sekitar 9.397,00-15.838,00 ton sampah dihasilkan setiap harinya, dengan sampah organik sebagai jenis terbesar sebanyak 55%, dan sampah plastik sebanyak 15,35%. Namun demikian, dalam pelaksanaannya pengelolaan terhadap sampah organik di wilayah ini justru tercatat sebagai jenis sampah yang paling sedikit dikelola dibandingkan dengan jenis sampah lainnya. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan antara volume jenis sampah yang dihasilkan dengan upaya penanganan yang dilakukan, sebagaimana ditampilkan upaya pengelolaan sampah yang dilakukan di Sektor 6 Baleendah pada gambar berikut:

Gambar 1. 2 Data Jumlah Sampah Terkelola di Wilayah Sektor 6
Sumber: Dokumen Laporan Kegiatan Sektor 6 Plastic Guardian, 2025

Gambar 1.2 menunjukkan bahwa upaya pengelolaan sampah organik jauh lebih kecil dibandingkan dengan pengelolaan sampah plastik dan residu. Di mana pada bulan Februari tahun 2025, tercatat bahwa data jumlah sampah organik yang berhasil terkelola hanya mencapai 11.160 kg. Hal ini jauh berbeda dibandingkan dengan jenis sampah plastik yaitu sebanyak 493.540 kg dan sampah residu sebanyak 298.537 kg yang berhasil terkelola. Upaya pengelolaan yang seharusnya terus meningkat, justru mengalami penurunan pada bulan berikutnya, dan sampah organik tetap menjadi jenis sampah yang paling sedikit terkelola di wilayah Sektor 6 Baleendah.

Mekanisme pengelolaan sampah yang belum optimal ini menyebabkan adanya ketidaksesuaian antara target kinerja program yang telah ditetapkan dengan capaian kinerja program yang terealisasi. Hal ini ditinjau dari dokumen Rekapitulasi Progress Sektor tahun 2025, sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Tabel 1. 2
Capaian Kumulatif Jumlah Sampah Terkelola di Wilayah Sektor 6

Program	Indikator *Outcome*	Sampah Masuk	Target	Capaian
Pengelolaan Sampan	Jumlah sampah yang terkelola (ton/hari)	9.397,00 - 15.838	10.700,00	8.187,00

Sumber: Dokumen Rekapitulasi Progress Sektor (Diolah Peneliti, 2025)

Tabel 1.2 menampilkan hasil capaian kumulatif mengenai jumlah sampah terkelola (ton/hari) di wilayah Sektor 6 pada bulan Januari-Mei 2025. Tercatat bahwa target sampah yang harus terkelola yaitu sebanyak 10.700,00 ton/hari. Akan tetapi, hasil pengelolaan sampah yang dilakukan hanya mencapai sekitar 8.187,00 ton/hari dari total timbulan sampah harian di wilayah ini sebesar 9.397,00-15.838 ton/hari. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di wilayah Sektor 6 belum mencapai target yang telah ditetapkan, karena masih menghadapi berbagai kendala yang dapat menghambat pencapaian tujuan program.

Pendistribusian sarana prasarana pengelolaan sampah seperti Tempat Penampungan Sementara (TPS), mesin pengolah sampah, dan kendaraan pengangkut sampah yang belum merata di sejumlah wilayah, juga menyebabkan sampah seringkali menumpuk di sejumlah titik, terutama di sekitar Jalan Jaksa Naranata, Baleendah dan Pasar Baleendah. Tempat pembuangan liar tersebut diduga menjadi alternatif masyarakat sekitar dalam menyikapi ketidaktepatan waktu pengangkutan sampah oleh petugas. Akibatnya, jalanan yang seharusnya bersih menjadi kumuh dan berpotensi mencemari lingkungan, serta mengganggu aktivitas pengguna jalan. Bahkan, tumpukan sampah ini bisa menumpuk selama beberapa hari tanpa adanya tindakan pengangkutan. Sebagaimana ditampilkan pada gambar berikut:

Gambar 1. 3 Kondisi Tumpukan Sampah di Lokasi Penelitian
Sumber: Observasi Peneliti (Kamis, 17 April 2025)

Sampah yang di buang sembarangan oleh masyarakat dan tidak terkelola dengan baik, juga menjadi salah satu faktor mengapa wilayah Baleendah seringkali mengalami bencana banjir di setiap tahunnya. Sampah anorganik seperti plastik, *styrofoam*, atau kemasan plastik lainnya merupakan jenis sampah yang paling banyak menyumbat saluran-saluran air. Karena sampah dengan jenis tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama untuk terurai dalam air menjadi mikroplastik. Oleh sebab itu, ketika hujan tiba dengan intensitas yang cukup tinggi, air tidak dapat mengalir dan meluap ke permukaan sehingga memicu terjadinya bencana banjir (Kusumaningtyas & Diana Hertati, 2024).

Meskipun telah dibentuk Tim Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagai wadah koordinasi lintas sektor untuk membantu pelaksanaan program. Akan tetapi, sinergi dan kolaborasi yang terjalin antara TNI, Sekretariat Satgas, Dinas Lingkungan Hidup, Masyarakat, dan Komunitas Lingkungan dalam mengatasi permasalahan sampah di Sektor 6 Baleendah dinilai masih tergolong rendah. Di mana masyarakat dan komunitas lingkungan seringkali hanya dilibatkan pada kegiatan gotong royong pembersihan sampah saja, tanpa diikutsertakan dalam kegiatan pelatihan pengelolaan sampah yang umumnya hanya ditujukkan kepada perangkat desa, yang notabene sudah memahami

dasar-dasar pengelolaan sampah dibandingkan dengan masyarakat biasa yang masih awam.

Selain itu, perbedaan fokus dan kepentingan pada setiap aktor yang terlibat juga menjadikan upaya pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran khususnya pada masyarakat yang membuang sampah sembarangan juga menjadi kurang optimal. Pemberlakuan sanksi administratif kepada pelanggar yang belum diatur secara khusus pada Peraturan Daerah/Peraturan Bupati menjadikan perilaku menyimpang masyarakat terus dinormalisasi dan tidak menimbulkan efek jera. Sehingga, upaya pengelolaan sampah yang mesti dilakukan sejak dari sumbernya sangat sulit untuk terealisasi.

Pencemaran air akibat sampah yang belum terselesaikan di DAS Citarum Sektor 6, tidak dapat terlepaskan dari ranah Kebijakan Publik yang menjadi dasar dalam pelaksanaan program Citarum Harum. Program ini ialah bentuk intervensi kebijakan yang salah satunya bertujuan untuk meningkatkan kondisi DAS Citarum yang bebas dari sampah. Mengingat masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya, diperlukan evaluasi untuk menilai capaian kinerja program. Salah satu aspek utama yang dinilai dalam proses evaluasi adalah efektivitas, karena aspek ini akan mencerminkan kemampuan kebijakan dalam mengatasi permasalahan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan teori efektivitas program yang dikemukakan oleh Sutrisno (2007), terdapat lima dimensi untuk menilai sejauh mana suatu program berjalan secara efektif, yaitu: Pemahaman Program, Tepat Sasaran, Tepat Waktu, Tercapainya Tujuan, dan Perubahan Nyata. Dengan mengacu pada lima dimensi ini, evaluasi program dapat dilakukan secara terstruktur dan sistematis guna mengetahui sejauh mana program yang dijalankan mampu menjawab permasalahan yang ada. Jika salah satu dimensi tidak terpenuhi, maka efektivitas program dipertanyakan dan perlu adanya penyesuaian strategi kembali dalam pelaksanaannya.

Berangkat dari permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, pelaksanaan Program Citarum Harum dalam mengatasi permasalahan sampah di DAS Citarum Sektor 6 Baleendah, Kabupaten Bandung, masih menghadapi berbagai tantangan dan hambatan yang cukup kompleks. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap program berdampak pada minimnya partisipasi aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah, kemudian berdampak juga pada pola perilaku masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan. Selain itu, pendistribusian sarana prasarana pengelolaan sampah yang belum merata menimbulkan ketidaktepatan waktu dalam proses pengelolaan sampah terutama pada proses pengangkutan. Akibatnya, target jumlah sampah yang berhasil terkelola setiap harinya di Sektor 6 belum tercapai.

Dengan demikian, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana efektivitas program Citarum Harum dalam mengatasi permasalahan sampah di sektor 6 Baleendah, serta mengidentifikasi faktor apa saja yang menjadi penghambat pencapaian target efektivitas program. Penelitian ini dirumuskan ke dalam bentuk skripsi dengan judul **"Efektivitas Program Citarum Harum dalam Mengatasi Permasalahan Sampah di Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum Sektor 6 Baleendah Kabupaten Bandung"** sebagai upaya untuk memberikan kontribusi dalam perbaikan kebijakan lingkungan yang berkelanjutan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti mengidentifikasi beberapa masalah yang ditemukan, diantaranya sebagai berikut:

1. Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme pengelolaan sampah.
2. Tidak tercapainya target jumlah sampah yang harus dikelola/hari.
3. Ketidaktepatan waktu proses pengangkutan sampah.
4. Kurangnya pendistribusian sarana prasarana pengelolaan sampah secara merata.

5. Minimnya perubahan pola perilaku masyarakat dalam membuang sampah sembarangan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang sudah dipaparkan sebelumnya, peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Pemahaman Penyelenggara dan Masyarakat mengenai Program Citarum Harum dalam Mengatasi Permasalahan Sampah di Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum Sektor 6 Baleendah Kabupaten Bandung?
2. Bagaimana Ketepatan Sasaran Program Citarum Harum dalam Mengatasi Permasalahan Sampah di Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum Sektor 6 Baleendah Kabupaten Bandung?
3. Bagaimana Ketepatan Waktu pelaksanaan Program Citarum Harum dalam Mengatasi Permasalahan Sampah di Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum Sektor 6 Baleendah Kabupaten Bandung?
4. Bagaiamana Ketercapaian Tujuan Program Citarum Harum dalam Mengatasi Permasalahan Sampah di Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum Sektor 6 Baleendah Kabupaten Bandung?
5. Bagaimana Perubahan Nyata yang dihasilkan oleh Program Citarum Harum dalam Mengatasi Permasalahan Sampah di Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum Sektor 6 Baleendah Kabupaten Bandung?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, peneliti memiliki tujuan yang ingin dicapai yakni sebagai berikut:

1. Mengetahui dan mendeskripsikan Pemahaman Penyelenggara dan Masyarakat mengenai Program Citarum Harum dalam Mengatasi Permasalahan Sampah di Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum Sektor 6 Baleendah Kabupaten Bandung.

UIN SUNAN GUNUNG DJATI

2. Mengetahui dan mendeskripsikan Ketepatan Sasaran Program Citarum Harum dalam Mengatasi Permasalahan Sampah di Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum Sektor 6 Baleendah Kabupaten Bandung.
3. Mengetahui dan mendeskripsikan Ketepatan Waktu pelaksanaan Program Citarum Harum dalam Mengatasi Permasalahan Sampah di Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum Sektor 6 Baleendah Kabupaten Bandung.
4. Mengetahui dan mendeskripsikan Ketercapaian Tujuan Program Citarum Harum dalam Mengatasi Permasalahan Sampah di Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum Sektor 6 Baleendah Kabupaten Bandung.
5. Mengetahui dan mendeskripsikan Perubahan Nyata yang dihasilkan oleh Program Citarum Harum dalam Mengatasi Permasalahan Sampah di Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum Sektor 6 Baleendah Kabupaten Bandung.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan kegunaan, baik kegunaan ilmiah (signifikansi akademik) maupun kegunaan sosial (signifikansi praktis). Berikut kegunaan penelitian yang diharapkan peneliti:

1. Kegunaan Ilmiah

   Penelitian ini secara ilmiah, diharapkan dapat berguna bagi kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan terutama dalam studi administrasi publik. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian relevan berikutnya dalam menyempurnakan serta memperkaya literatur mengenai efektivitas Program Citarum Harum.

2. Kegunaan Sosial

   Penelitian ini secara sosial, diharapkan dapat berguna bagi kepentingan-kepentingan praktis diantaranya sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI

a. Peneliti

Penelitian ini memberikan kegunaan bagi peneliti dalam memahami efektivitas suatu progam, sehingga peneliti dapat menilai dan memberikan sebuah rekomendasi yang relevan.

b. Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumber referensi dalam perkembangan ilmu pengetahuan terutama dalam studi Administrasi Publik di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

c. Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan untuk meningkatkan Efektivitas Program Citarum Harum dalam mengatasi permasalahan sampah di Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum Sektor 6 Baleendah Kabupaten Bandung.

d. Publik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang bermanfaat bagi masyarakat, terutama masyarakat sekitar DAS Citarum Baleendah dalam meningkatkan kesadaran mengenai dampak negatif membuang sampah sembarangan. Sehingga, masyarakat turut berpartisipasi aktif dalam menjaga lingkungan dan ekosistem sungai Citarum.

F. Kerangka Berpikir

Dalam upaya memudahkan peneliti dalam memahami, mengidentifikasi, dan mengkaji permasalahan yang ada pada penelitian ini, maka peneliti merancang sebuah kerangka konseptual yang menjadi acuan atau landasan teoritis terkait relevansi antara permasalahan dan strategi yang dipilih. Penelitian ini berusaha untuk mengkaji sejauh mana efektivitas program citarum harum dalam mengatasi permasalahan sampah di DAS Citarum Sektor 6 Baleendah. Kemudian, menganalisis apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program.

Nicholas Henry mendefinisikan administrasi publik sebagai satu kesatuan yang kompleks, mencakup aspek teori dan praktek, serta memiliki capaian pemahaman mengenai hubungan antara pemerintah dan masyarakat dalam mendorong kebijakan publik yang selaras dengan kebutuhan publik (Pasolong, 2022). Kebijakan publik menurut Laswell dalam Abidin (2016) diartikan sebagai alat berupa program yang dirancang untuk mencapai tujuan bersama, berdasarkan nilai-nilai yang dijadikan pedoman, dan diterapkan melalui langkah-langkah yang terstruktur.

Holwet dan Ramesh menguraikan proses kebijakan publik ke dalam lima tahap, yaitu: Penyusunan Agenda, Formulasi Kebijakan, Pembuatan Kebijakan, Implementasi Kebijakan, dan Evaluasi Kebijakan. Dari kelima tahap tersebut, evaluasi kebijakan sangat penting untuk melihat sejauh mana kinerja kebijakan dapat berjalan sesuai dengan perencanaan awal. Dalam proses evaluasi, salah satu aspek utama yang dinilai adalah efektivitas suatu kebijakan dalam mengatasi permasalahan dan mencapai tujuan (Subarsono, 2013).

Efektivitas kebijakan erat kaitannya dengan efektivitas program karena kebijakan memberikan kerangka kerja dan arah kebijakan, sementara program adalah bentuk konkret dari kebijakan tersebut. Kebijakan yang sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan masyarakat akan menciptakan program atau kegiatan yang relevan di masyarakat. Sehingga, permasalahan sosial yang lahir di lingkungan masyarakat dapat teratasi oleh program dan kegiatan yang dijalankan.

Menurut Sutrisno (2007), terdapat lima ukuran untuk menilai sejauh mana suatu program berjalan secara efektif, diantaranya: Pemahaman Program, Tepat Sasaran, Tepat Waktu, Tercapainya Tujuan, dan Perubahan Nyata. Dengan mengacu pada lima dimensi ini, evaluasi program dapat dilakukan secara terstruktur dan sistematis guna mengetahui sejauh mana program yang dijalankan mampu menjawab permasalahan yang ada. Jika salah satu dimensi tidak terpenuhi, maka efektivitas program dipertanyakan dan perlu adanya penyesuaian strategi kembali dalam pelaksanaannya.

Berikut merupakan lima ukuran untuk mengetahui sejauh mana keefektifan suatu program menurut Sutrisno (2007), diantaranya:

1. **Pemahaman Program**, merupakan salah satu kunci keberhasilan berjalannya suatu program, di mana program yang diciptakan mampu dipahami oleh berbagai pihak yang terlibat dalam proses pelaksanaan program. Dalam hal ini, mengetahui sejauh mana penyelenggara program dan masyarakat dapat memahami tujuan, manfaat, dan mekanisme suatu program. Pemahaman program yang baik, memungkinkan dapat membantu mencapai target capaian yang telah ditetapkan. Maka, kejelasan informasi mengenai program harus disampaikan dengan baik kepada semua pihak yang terlibat, khususnya kepada kelompok sasaran kebijakan.
2. **Tepat Sasaran,** berarti suatu program yang dilaksanakan mampu mencapai sasaran program yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, melihat apakah hasil kinerja program yang dicapai sesuai dengan target sasaran yang telah ditetapkan atau tidak. Penentuan sasaran program juga perlu disesuaikan dengan kemampuan sumber daya program, karena jika tidak disesuaikan sasaran program akan sulit dicapai. Berhasil atau tidaknya suatu program dapat dilihat dari kemampuan program dalam mencapai target atau sasaran.
3. **Tepat Waktu,** ini berkaitan dengan perencanaan yang ditetapkan oleh penyelenggara program mengenai jangka waktu pelaksanaan program. Hal ini bertujuan untuk melihat apakah pelaksanaan program berjalan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan atau tidak. Suatu program dikatakan efektif apabila tujuan program dapat tercapai sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam hal ini, mengetahui sejauh mana program dapat mengatasi permasalahan yang ada sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.
4. **Tercapainya Tujuan,** berarti hasil pelaksanaan suatu program sesuai dengan tujuan program yang ditetapkan pada awal perencanaan program. Dalam hal ini, mengetahui sejauh mana pencapaian tujuan program yang dijalankan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Suatu program dikatakan efektif apabila tujuan program dapat tercapai, dan sebaliknya.
5. **Perubahan Nyata,** yakni suatu program yang diciptakan mampu memberikan dampak atau perubahan yang nyata bagi seluruh pihak yang terlibat. Perubahan nyata yang dimaksud adalah beralihnya suatu kondisi tertentu kepada kondisi yang sesuai dengan harapan dan selaras dengan tujuan program yang ditetapkan. Suatu program dikatakan efektif apabila dapat membawa suatu keadaan yang kurang baik menjadi lebih baik. Dalam hal ini, mengetahui sejauh mana program dapat mengatasi permasalahan yang ada dan memberikan perubahan nyata bagi semua pihak yang terlibat.

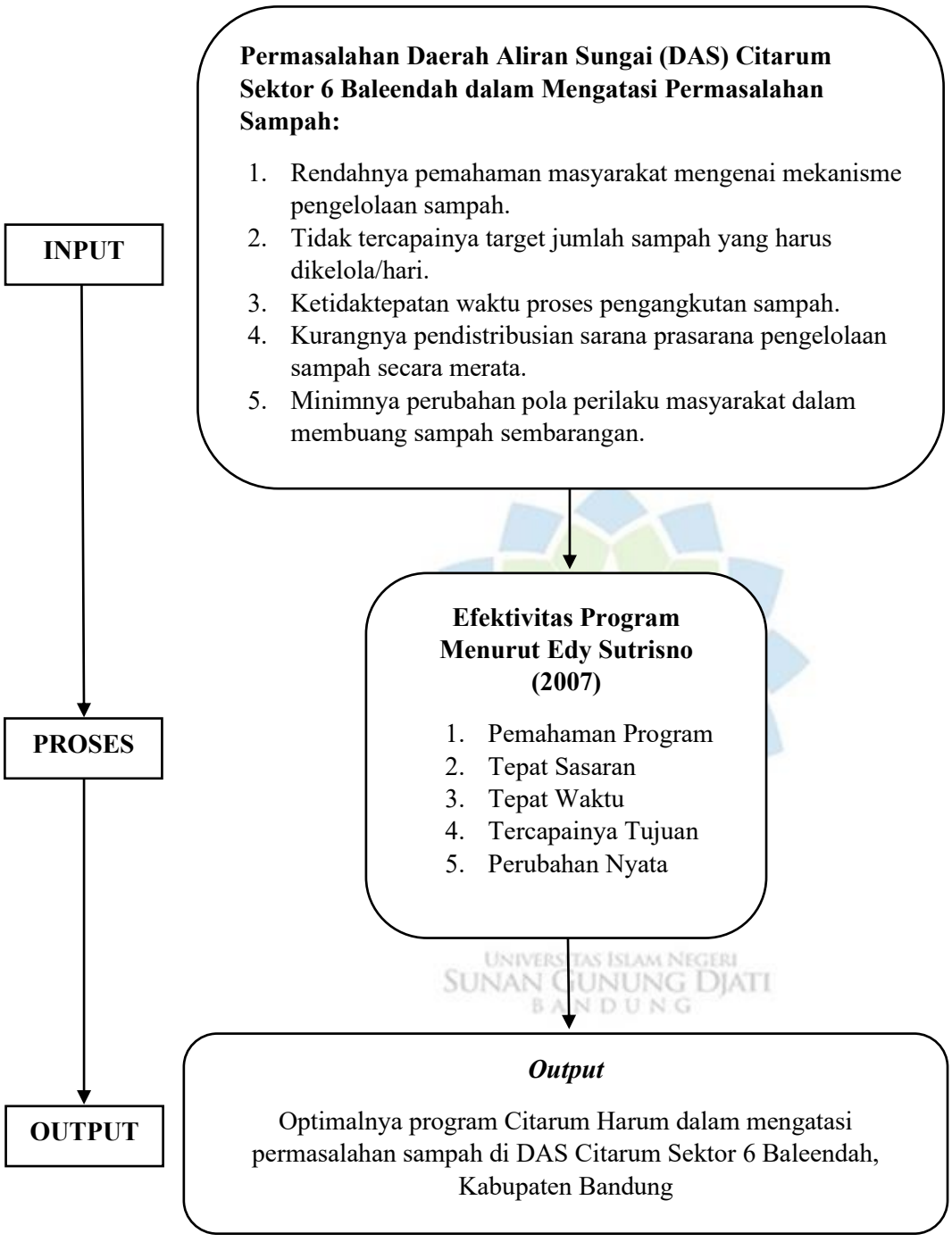

Gambar 1. 4 Kerangka Berpikir
Sumber: Hasil Penelitian (Diolah Peneliti, 2025)